

## Survival Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis Bahan Pangan di Kota Metro

Khansa Kamilia Safitri, Firmansyah, Siti Mustaghfiroh

Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung

Correspondence: khansakamiliasafitri@gmail.com;firmansyah@metrouniv.ac.id;mustaghfiroh@metrouniv.ac.id

**Abstrak.** Krisis bahan pangan masih menjadi permasalahan yang signifikan hingga saat ini. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasinya melalui berbagai strategi dan kebijakan, tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan penurunan produksi pangan tetap menjadi faktor utama penyebab krisis ini. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang strategi dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi krisis bahan pangan di Kota Metro sepanjang tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis strategi ketahanan pangan yang dikembangkan pemerintah serta menilai efektivitasnya dalam merespons tantangan krisis secara optimal. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan dan program pemerintah melalui data yang diperoleh dari wawancara serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menyoroti pentingnya strategi yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal. Dengan penekanan pada program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang terbukti efektif meningkatkan ketersediaan pangan di Kota Metro. Namun, tantangan dalam keterjangkauan harga masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan demikian program 4K memiliki potensi signifikan dalam mengatasi krisis pangan di Metro, namun evaluasi dan perbaikan berkala diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini dalam jangka panjang.

**Kata kunci :** Strategi ketahanan, Kebijakan, Krisis pangan

**Abstract.** *The food crisis remains a significant issue up to the present time. Even though the Government has made an effort to overcome it through numerous strategies and policies, challenges serving as land conversion, climate change and a decrease of food production remains the primary factors that cause the crisis. This research intended to provide a comprehensive overview of the strategies and regulations executed by the government in handling the food crisis in Metro City throughout 2024. The primary focus of this research is to analyze food security strategies evolved by the Government moreover appraise their effectiveness in optimally responding to the challenges of the crisis. Using a qualitative approach, this research examines various government policies and programs through data obtained from interviews and document analysis. The findings emphasize the significance of well-designed strategies aimed at enhancing local food resilience. The research particularly focuses on the 4K Program (Price Affordability, Supply Availability, Distribution Flow, and Effective Communication), which has proven effective in increasing food availability in Metro City. Nonetheless, challenges remain in terms of price affordability, which warrants further attention. In conclusion, while the 4K Program demonstrates considerable potential in addressing the food crisis in Metro, ongoing evaluation and periodic improvements are essential to ensure the program's long-term sustainability and effectiveness.*

**Keywords:** *Survival strategy, policy, food crisis.*

### PENDAHULUAN

Krisis pangan telah menjadi ancaman serius yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Berdasarkan data *Global Food Security Index* tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara, tertinggal di belakang negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.<sup>1</sup> Kondisi ketimpangan ketahanan pangan dalam negeri juga semakin mengkhawatirkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa sebanyak 24,09 juta orang, atau sekitar 8,53% dari total penduduk, mengalami krisis pangan.<sup>2</sup> Situasi serupa juga terjadi di tingkat lokal, seperti di Kota Metro prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mencapai 8,38%, yang mencerminkan adanya

---

<sup>1</sup> <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/explore-countries/indonesia>, Diakses pada 18 oktober 2024.

<sup>2</sup> Linnia Siska Risandi dan Dahiri, "Ancaman Krisis Pangan Global Terhadap Komoditas Pangan Nasional," *Buletin APBN*, 2022.

kerentanan pangan pada wilayah tersebut.<sup>3</sup> Situasi ini dipicu oleh berbagai faktor, yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, penurunan produktivitas pangan, dan dampak perubahan iklim. Akibatnya, masyarakat, terutama kelompok miskin, semakin terjerumus dalam kemiskinan dan terjadi ketidaksetaraan pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil kebijakan serta langkah-langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pangan serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Berbagai penelitian telah membahas tentang strategi ketahanan pemerintah dalam menghadapi krisis pangan. Beberapa penelitian menyoroti bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat, khususnya di wilayah yang rentan krisis. Hasil penelitian penunjukan bahwa kebijakan ketahanan pangan yang efektif mencakup ketersediaan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas, harga yang terjangkau, serta keamanan pangan bagi seluruh konsumen.<sup>5</sup> Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam upaya mengatasi tantangan krisis pangan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan proyek food estate. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan secara signifikan produksi pangan lokal, khususnya komoditas pangan pokok. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal seperti sorgum, jagung, dan sagu sebagai alternatif beras.<sup>6</sup> Namun, meskipun berbagai penelitian telah mengupas tentang strategi dan implementasi ketahanan pangan, masih terbatas studi yang secara khusus mengulas efektivitas kebijakan tersebut dalam skala lokal, terutama terkait dengan kerentanan masyarakat terhadap kelangkaan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi lebih dalam mengenai strategi ketahanan pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman krisis pangan di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi krisis bahan pangan. Dengan mengumpulkan penelitian yang ada dan mengacu pada bukti empiris, penulis berusaha memetakan pola *survival strategy*. Kebijakan pemerintah, krisis bahan pangan bagi masyarakat agar dapat secara efektif melindungi kesejahteraan masyarakat daerah Kota Metro dari krisis bahan pangan. Dengan mengidentifikasi faktor perlindungan terjadinya krisis masyarakat dengan mendorong adanya *survival strategy* dan kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan ganda ini, penulis berharap dapat berkontribusi menggambarkan upaya yang lebih baik untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Metro.

Asumsi dasar yang hendak dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemerintah Kota Metro dalam menanggulangi krisis bahan pangan dapat efektif jika strategi yang diterapkan mencakup pengelolaan sumber daya pangan secara berkelanjutan, stabilisasi harga melalui program seperti 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), serta adanya upaya yang kuat untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk produksi pangan dan edukasi tentang pentingnya ketahanan pangan juga dianggap penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil rumusan masalah meliputi:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya krisis pangan di Kota Metro?
2. Bagaimana strategi dan regulasi yang diterapkan pemerintah Kota Metro dalam mengatasi krisis bahan pangan?
3. Bagaimana pelaksanaan program yang telah dilakukan pemerintah Metro dalam menanggulangi krisis pangan?

---

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-persen-.html>, Diakses pada 18 oktober 2024.

<sup>4</sup> Syafitri Jumianto, dkk, "Efisiensi Pemanfaatan Maggot Bsf (*Hermetia Illucens*) Dalam Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan," *Edubiologia: Biological Science And Education Journal*, (2023).

<sup>5</sup> Kaslam Kaslam, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Pangan Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, No. 1 (2023): 85-104.

<sup>6</sup> Alsafana Rasman, dkk, "Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia," *Holistic: Journal Of Tropical Agriculture Sciences*, 2023.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam strategi kebertahanan (*survival strategy*) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam mengatasi krisis bahan pangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, menjaga kestabilan harga, serta memastikan distribusi yang lancar dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan kegiatan meliputi tahap persiapan, pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi, serta pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Rancangan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kebijakan *survival strategy* yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam menghadapi krisis pangan. Objek penelitian berfokus pada efektivitas berbagai langkah kebijakan yang diterapkan pemerintah, seperti keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, serta strategi distribusi, dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Kota Metro.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para informan kunci, seperti Kepala Bagian Perekonomian, Analis Kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan dan staf terkait di Kantor Walikota Metro. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber utama dan memberikan gambaran yang akurat mengenai penerapan strategi kebertahanan pangan.

#### **b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang terdiri dari literatur akademik, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan kebijakan kebertahanan pangan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan dari data primer dan memberikan kerangka teoritis bagi analisis lebih lanjut.

### **5. Tempat**

Tempat penelitian ini adalah di Kota Metro, khususnya di Kantor Walikota Metro Bagian Perekonomian, yang menjadi lokasi utama untuk pengumpulan data mengenai kebijakan kebertahanan pangan dalam menghadapi krisis.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

#### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan informan kunci, termasuk Kepala Bagian Perekonomian, Analis Kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan dan staf lainnya yang berperan dalam strategi kebertahanan pangan di Kota Metro. Teknik ini digunakan untuk memahami secara langsung pandangan dan pengalaman informan terkait efektivitas kebijakan yang diterapkan.

#### **b. Observasi**

Observasi dilakukan di lapangan untuk memperoleh data visual mengenai implementasi kebijakan dan strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan data yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

### **7. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **a. Survival Strategi**

*Survival strategy* diartikan sebagai strategi bertahan seseorang atau sekelompok orang untuk melestarikan keberadaannya yang mempunyai nilai atau dianggap berharga, baik yang bersifat

non-materi maupun materiil.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu penelitian Muthia Ulfah dan Bayu Kurnia<sup>8</sup> menjelaskan strategi bertahan dapat dimaknai sebagai suatu langkah yang dilakukan untuk tidak mengalami kemunduran. Dalam konteks ini *survival strategy* merujuk pada strategi pemerintah dalam mengatasi kondisi krisis pangan. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 menjelaskan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasar konsep tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*food security*), yang harus diperhatikan.<sup>9</sup>

Ciri-ciri utama dari strategi ketahanan pangan meliputi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan menekankan produksi lokal yang memadai dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sementara akses pangan memastikan distribusi yang efisien dan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.<sup>10</sup> Pemanfaatan pangan menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang pola makan sehat dan diversifikasi konsumsi pangan untuk mencapai gizi seimbang. Selain itu, diversifikasi sumber pangan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, dan kemandirian pangan berfokus pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa bergantung pada impor. Perbaikan infrastruktur logistik juga mendukung distribusi pangan yang efisien. Pendekatan komprehensif ini mengintegrasikan sektor pertanian, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.<sup>11</sup>

b. Kebijakan

Konsep Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrumen tertentu. Kebijakan juga diartikan suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak<sup>12</sup>. Sejalan dengan penelitian Nur Handayani, dkk<sup>13</sup> menjelaskan pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrat. Penelitian Dian Kus Pratiwi<sup>14</sup> menjelaskan suatu kebijakan memberikan kepastian dan keterukuran serta jaminan pada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat sebagai pemegang amanat kepentingan nasional memiliki tanggung jawab akhir dan yang juga memiliki tugas dan fungsinya sendiri.

Kebijakan pemerintah menurut Intan Fitri Meutia<sup>15</sup> memiliki empat ciri umum yang menjadi karakteristiknya. Pertama, kebijakan adalah tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu, seperti mengendalikan inflasi. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk

---

<sup>7</sup> Aimie Sulaiman, "Strategi Bertahan (*Survival Strategy*), Studi Tentang 'Agama Adat' Orang Lom Di Desa Pejem," *Jurnal Society*, Vol.11, No. 1, (2014): 1-13.

<sup>8</sup> Muthia Ulfah dan Bayu Kurnia, "Strategi Bertahan Usaha Mikro Di Wilayah Pariwisata Kota Padang Di Tengah Pandemi Covid-19," *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 12, No. 2, (2021): 146-56.

<sup>9</sup> Yelly Zamaya, dkk, "Life Survival Strategy Perempuan Rumah Tangga Miskin Desa Logas Kabupaten Kuantan Singingi," *Jepp : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, (2023).

<sup>10</sup> <https://badanpangan.go.id/blog/post/jajaki-kerjasama-dengan-isdb-nfa-paparkan-strategi-mencapai-ketahanan-pangan-dan-status-gizi>, Diakses pada 20 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Miyasto, "Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Kajian Lemhanas*, Vol. 12, No. 17, (2019) : 17-34.

<sup>12</sup> Bibit Santoso, "Menata Kebijakan Publik Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Masyarakat Bila Diundangkan," *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 13, No. 1, (2018): 36-53.

<sup>13</sup> Nur Handayani, dkk, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, (2021): 32-40.

<sup>14</sup> Dian Kus Pratiwi, "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum*, (2021).

<sup>15</sup> Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, 2017.

positif, mungkin pula negative. Keempat ciri ini menghasilkan konsep kebijakan pemerintah yang dinamis, memungkinkan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan dan memastikan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Krisis Pangan

Krisis pangan, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang adapun dalam penelitian. Menurut Bapanas penyebab dari adanya krisis pangan antara lain, kesulitan distribusi pangan, perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial<sup>16</sup>. Penelitian Nani Apriani<sup>17</sup> menjelaskan ,untuk mengatasi krisis pangan diperlukan cara agar tercipta ketahanan pangan yang berdampak pada masyarakat, dengan dikeluarkannya program terkait ketahanan pangan.

Penelitian Maryati dan Subiyanto menekankan bahwa dalam mengatasi krisis bahan pangan, terdapat tiga sub-sistem utama yang harus diperhatikan. Yang pertama ketersediaan pangan, mencakup jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan, atau bantuan pangan. Kedua akses pangan meliputi distribusi pangan yang efektif, penjualan pangan yang terjangkau, serta penanganan pangan yang baik. Dan yang ketiga penyerapan pangan meliputi pola makan yang seimbang, konsumsi pangan yang berimbang, serta perilaku makan yang sehat.<sup>18</sup> Dengan demikian, strategi pemerintah dapat efektif dalam mengatasi krisis pangan dan memastikan ketahanan pangan nasional.

8. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan interpretasi mendalam terhadap data observasi, wawancara, dan bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti menggunakan restatement untuk memahami data, deskripsi untuk mengidentifikasi pola, dan interpretasi untuk memberikan makna atas temuan. Pendekatan ini bertujuan mengungkap strategi pemerintah dalam mengatasi krisis pangan dan menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan, guna memberikan pemahaman komprehensif tentang ketahanan pangan di Indonesia.

**HASIL**

**Faktor Penyebab Terjadinya Krisis Bahan Pangan**

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya krisis bahan pangan di Kota Metro yang di pengaruhi oleh, penurunan produksi pangan, kelangkaan stok beras, fluktuasi dan kenaikan harga,distribusi yang tidak merata dan terjadi penimbunan sembako jenis tertentu.

**Table 1.1 tentang Krisis Bahan Pangan**

Informan	Faktor krisis pangan	Narasi Wawancara
M (28), sebagai analis ekonomi kreatif	Penurunan Produksi Pangan Lokal	Bukan hanya Kota Metro tetapi secara nasional produk beras memang menurun, jadi banyak yang kekurangan beras, beras pun jadi naik harganya. Di tahun 2024 stok gabah/beras semakin terbatas dan mahal disebabkan masa tanam yang terlambat, gagal panen petani sebagai dampak dari El-Nino/cuaca buruk serta adanya peningkatan biaya produksi seperti sewa lahan dan harga pupuk. ada juga faktor dari petani yang malah menjual padinya ke jawa yaitu ke PT wilmar, PT tersebut berani membeli harga tinggi jadi

<sup>16</sup> <https://badanpangan.go.id/blog/post/pemerintah-bersama-akademisi-dan-kalangan-media-massa-siap-hadapi-tantangan-el-nino-yang-diprediksi-agustus-2023>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

<sup>17</sup> Nani Apriani Natsir Djide, dkk, “Edukasi Diversifikasi Pangan Dan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Pencegahan Krisis Pangan Di Era Pandemi Covid-19,” *Indonesian Journal Of Community Dedication*, (2022).

<sup>18</sup> Maryatin dan Subiyanto, “Sebuah Paradoksal Krisis Pangan Dan Ironi Ketahanan Pangan,” *Tinjauan Perspektif Islam*, (2013).

		masyarakatnya banyak yang jual kesana, pabrik pabrik jadi pada gabisa beli padi petani sehingga supply beras jadi turun.
HR, DKP3 Kota Metro	Kelangkaan stok beras	Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro, tercatat bahwa kebutuhan beras masyarakat Kota Metro mencapai 15.000 ton per tahun. Namun, terjadi defisit sebesar 6.000 ton pada periode Februari hingga Maret 2024. Defisit ini disebabkan oleh penurunan air di waduk, yang berujung pada kekeringan lahan pertanian padi. Kondisi ini menghambat produksi, sehingga stok beras mengalami penurunan signifikan. Meskipun pada bulan Maret terjadi panen raya dengan hasil panen sebesar 17.200 ton gabah yang diharapkan menghasilkan sekitar 9.000 ton beras, Kota Metro masih mengalami kekurangan pasokan beras. Untuk memenuhi kebutuhan, Kota Metro harus mengimpor beras dari wilayah lain seperti beberapa bagian Lampung dan Pulau Jawa.
LM (60) sebagai analisis kebijakan	Fluktuasi dan Kenaikan Harga Komoditas Pokok	Harga komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan telur sangat rentan mengalami fluktuasi. Ini yang kita sebut sebagai volatile food. Perubahan harga pada komoditas ini seringkali terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi dengan mudah, misalnya saat terjadi gagal panen, gangguan distribusi, atau peningkatan permintaan pada musim-musim tertentu. Karena produk ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat, kenaikan harga mereka dapat langsung memengaruhi inflasi. Jadi, ketika harga cabai atau daging ayam naik, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari, dan ini secara signifikan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi
NK (54) staf bagian perekonomian	Keterlambatan penyaluran bahan pangan	Keterlambatan penyaluran bahan pangan alokasi Januari 2024 memang menjadi permasalahan di Kota Metro. Proses ini terganggu karena verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang masih berlangsung hingga saat ini. Akibatnya, distribusi bahan pangan untuk masyarakat yang seharusnya diterima tepat waktu tertunda, dan ini memperburuk situasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Ketika distribusi pangan tidak berjalan sesuai jadwal, ketersediaan di pasar berkurang, dan ini menyebabkan lonjakan harga pada komoditas pangan yang semakin memberatkan masyarakat.
HS Bareskrim satgas pangan polres metro	Terjadi penimbunan sembako jenis tertentu	Kota Metro memprediksi adanya kenaikan sembako yang cukup tinggi, terjadi kelangkaan sembako jenis tertentu yaitu adanya penimbunan sembako; terjadi permainan harga barang yang di lakukan secara sepihak, baik yang di lakukan oleh distributor, agen ampai pada pedagang eceran.

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa krisis pangan di Kota Metro dipicu oleh beberapa faktor. Penurunan produksi pangan lokal disebabkan oleh alih fungsi lahan dan perubahan iklim, sehingga ketersediaan pangan lokal menurun. Selain itu, fluktuasi dan kenaikan harga komoditas pokok seperti beras, cabai, dan bawang merah turut memperburuk situasi, menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau. Keterlambatan penyaluran bahan pangan, terutama karena gangguan transportasi dan infrastruktur, semakin memperparah masalah. Di sisi lain, adanya penimbunan sembako jenis tertentu oleh pihak-pihak tertentu menambah tekanan pada pasokan pangan, memicu kelangkaan barang dan lonjakan harga di pasar. Faktor-faktor ini secara bersama-sama berkontribusi terhadap terjadinya krisis pangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Terdapat setidaknya lima faktor utama yang menyebabkan krisis bahan pangan di Kota Metro, yaitu penurunan produksi pangan lokal, kelangkaan stok beras, fluktuasi dan kenaikan harga komoditas pokok, Keterlambatan penyaluran bahan pangan, serta praktik penimbunan sembako pada jenis tertentu. Faktor-faktor ini mengakibatkan masyarakat kesulitan mengakses pangan yang terjangkau dan mudah didapatkan. Apabila situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di masa mendatang, mengingat hal ini berdampak langsung pada kebutuhan dasar

hidup banyak orang. Krisis pangan yang berlarut-larut dapat memicu ketidakstabilan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan menambah beban pada kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, perlu ada intervensi segera dari pemerintah untuk menstabilkan produksi dan distribusi pangan serta menjaga keterjangkauan harga agar ketahanan pangan di Kota Metro tetap terjaga.

**Tabel 1.2 Efektivitas Program Yang di Lakukan**

Program Yang Dilakukan	Efektif/ Tidak Efektif	Narasi Wawancara
Bantuan Pangan Beras bagi Masyarakat kurang mampu, Bazar Jumat, Penetrasi Paar, Bazar Jumat, Pasar Murah	Efektif	Melalui rangkaian kegiatan ini, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berhasil dilaksanakan, dimana kegiatan tersebut telah membantu masyarakat saat terjadi kelangkaan serta kenaikan stok, dimana bagi masyarakat yang kurang mampu pemerintah memberikan subsidi beras gratis sedangkan bagi Masyarakat yang lain dapat mengakses beras dengan lebih murah. Sebagai hasilnya, harga beras yang sebelumnya mencapai Rp 11.950 per kilogram, berhasil turun menjadi Rp 10.500 per kilogram. Selain itu, harga padi juga mengalami penurunan, dari Rp 7.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Seiring dengan berbagai program stabilisasi harga dan pasokan beras yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah, pada bulan September 2024, stok beras di Kota Metro berhasil mencapai 19.908,28 ton. Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan masyarakat yang tercatat sebanyak 1.098,11 ton per bulan, sehingga Kota Metro kini berada dalam kondisi pasokan yang lebih aman. Program-program tersebut menunjukkan efektivitas dalam menjaga ketersediaan pangan serta mengantisipasi kelangkaan yang berpotensi terjadi di masa mendatang
Sidak pasar dan agen ,survey stok beras, monitoring dan evaluasi stok, operasi pasar	Efektif	Kegiatan yang rutin di laksanakan oleh pemerintah Kota Metro terbukti sangat efektif dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok di pasar. Melalui kegiatan ini, kami dapat memantau langsung kondisi stok bahan pangan di tingkat pasar dan agen, sehingga kami bisa segera mengambil tindakan jika ditemukan kekurangan atau lonjakan harga yang tidak wajar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi penimbunan barang yang dapat mengakibatkan harga yang tidak wajar.
Penyaluran Bibit pada Gerakan Tanam Pangan Keluarga (Gertapaga) cabai, tomat dan terong	Efektif	Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk menanam tanaman pangan. Hingga saat ini, total bibit yang telah kami salurkan cukup signifikan. Pada bulan Januari, kami telah menyalurkan 5.189 bibit cabai, 645 bibit terong, dan 269 bibit tomat. Pada bulan Februari, tambahan 1.650 bibit cabai juga sudah disalurkan, dan di bulan Maret kami mendistribusikan 4.030 bibit cabai. Dengan menanam sendiri tanaman di pekarangan rumah, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pasar, terutama ketika harga komoditas ini naik.
Kerja sama Anatar Daerah (KAD) penghasil komoditi	Efektif	Kota Metro telah menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa daerah penghasil komoditas penting untuk memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat. Kerja sama ini sangat efektif dalam mencukupi kebutuhan pokok, seperti beras dan bawang merah. Sebagian besar kebutuhan pangan Kota Metro didatangkan dari luar daerah terutama Pulau Jawa. Sebagai contoh, kami bekerja sama dengan Kabupaten Mesuji untuk supali tanaman pangan, dan dengan Brebes untuk memastikan pasokan bawang merah yang stabil. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak kekurangan stok bahan pangan dan dapat memperoleh komoditas dengan harga yang stabil, terutama di saat fluktuasi harga atau keterbatasan pasokan di pasar lokal

Table 2 diatas menyajikan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Program bantuan pangan beras bagi masyarakat kurang mampu, bazar jumat, penetrasi pasar, dan pasar murah berhasil membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kegiatan sidak pasar dan agen, survei stok beras, serta monitoring dan evaluasi stok secara rutin memastikan ketersediaan pasokan pangan yang stabil di pasar. Operasi pasar juga efektif dalam menstabilkan harga saat terjadi lonjakan. Program penyaluran bibit melalui gerakan tanam pangan keluarga (gertapaga) yang mencakup tanaman cabai, tomat, dan terong berhasil mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan meningkatkan produksi pangan mandiri. Kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah penghasil komoditas, seperti kabupaten mesuji untuk beras dan brebes untuk bawang merah, juga memainkan peran penting dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan harga yang stabil bagi masyarakat.

Analisis tabel menunjukkan bahwa program-program ketahanan pangan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Metro telah berjalan efektif, sebagaimana tercermin dalam Tabel 1 hingga Tabel 4.

Keberhasilan ini didukung oleh kerja sama yang erat antara pemerintah dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bersama-sama memastikan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilitas pasokan di pasar lokal. Melalui sinergi lintas sektor, program seperti operasi pasar, bazar murah, dan Gerakan Tanam Pangan Keluarga (Gertapaga) berhasil meningkatkan akses pangan dan partisipasi masyarakat dalam menanam bahan pangan sendiri. Program Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah penghasil komoditas juga memperkuat pasokan pangan dan menstabilkan harga di Kota Metro. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah dan OPD, langkah-langkah ini membuktikan komitmen pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan ketahanan pangan secara terukur dan efektif.

### Regulasi Dan Strategi Yang Diterapkan Pemerintah Kota Metro Dalam Mengatasi Krisis Bahan Pangan

Penetapan regulasi yang pemerintah lakukan mengacu kepada strategi dalam mengatasi krisis bahan pangan. Dalam penelitian ini mencakup tiga regulasi pemerintah dalam mengatasi krisis pangan.

**Tabel 2.1 Regulasi Tentang Ketahanan Pangan**

Regulasi	Isi Regulasi	Sumber
Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 Tentang pangan	Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.	Online di lihat dari JDIIH BPK
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Cadangan Pangan Pemerintah	Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi Cadangan Pangan Pemerintah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.	Online dilihat dari JDIIH BPK
Keputusan WaliKota Metro No.141/kpts/04/ setda/2021	Keputusan WaliKota Metro No. 141/kpts/04/setda/2021 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Ketersediaan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok, Operasi Pasar, dan Penetrasi Pasar.	Bagian perekonomian metro

Data yang disajikan dalam tabel 1 memperlihatkan adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis bahan pangan, mengacu pada beberapa strategi penting. Beberapa regulasi tersebut yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama pada Pasal 12, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, serta distribusi pangan pokok untuk memastikan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Sejalan dengan Undang-Undang diatas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimaksudkan untuk negara memastikan terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Selanjutnya Keputusan WaliKota Metro No.141/KPTS/04/SETDA/2021 yang mengatur tentang pembentukan monitoring ketersediaan distribusi kebutuhan bahan pokok, operasi pasar, dan penerapan pasar, yang dikelola oleh bagian perekonomian Setda Metro.

Berbagai regulasi yang ditampilkan dalam tabel 1 menunjukkan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan pokok bagi seluruh masyarakat. Regulasi tersebut memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola dan menangani krisis pangan, jika terjadi. Tabel ini mengungkapkan tiga peran utama pemerintah: pertama, memastikan ketersediaan pangan yang cukup; kedua, menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan ketiga, memenuhi kebutuhan pangan dasar secara merata di seluruh wilayah. Ketiga regulasi ini menegaskan peran pemerintah yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan pangan

yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, pemerintah juga menjalankan pengawasan yang ketat untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga melalui kebijakan yang berkelanjutan dan terukur.

**Tabel 2.2 Strategi Pemerintah Daerah Kota Metro Dalam Mengatasi Krisis Bahan Pangan**

<b>Informan</b>	<b>Konteks</b>	<b>Narasi wawancara</b>
LM (60) sebagai analisis kebijakan	Keterjangkauan harga	Keterjangkauan harga merupakan salah satu pilar utama dalam strategi 4K yang kami terapkan. Kebijakan ini untuk memastikan bahwa harga-harga barang, terutama barang kebutuhan pokok, tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
WO, (27) sebagai staf bagian perekonomian	Ketersediaan Pasok	Tentu, ketersediaan pasokan adalah salah satu elemen kunci dalam strategi kami. Pada triwulan I di tahun 2024 ini terdapat gejala harga yang disebabkan kekurangan pasokan dan dikarenakan menjelang bulan suci Ramadhan, siklus harga mengalami kenaikan akibat banyaknya permintaan.
M (28), sebagai analis ekonomi kreatif	Kelancaran Distribusi	Untuk memastikan kelancaran distribusi itu, kami memastikan agar sistem distribusi barang berjalan tanpa hambatan. Hampir Sebagian besar kebutuhan pangan Kota Metro didatangkan dari luar daerah terutama pulau jawa sehingga kelancaran transportasi dan penyeberangan Merak-Bakauheni sangat berpengaruh.
NK (54) staf bagian perekonomian	Komunikasi Efektif	Kami selalu berupaya untuk menyampaikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang kondisi pasokan dan harga barang. melibatkan komunikasi yang baik antara pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat. Tetapi dalam proses ini Sebagian Masyarakat belum paham mengenai pentingnya pengendalian inflasi dan perlu adanya edukasi yang terus terus dari pemerintah.

Data yang disajikan dalam tabel 2 menunjukkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari bagian perekonomian Kota Metro. Pemerintah telah menerapkan strategi “4K” sebagai upaya mengatasi krisis pangan. Pertama, keterjangkauan harga, suatu kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan harga dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Kedua, ketersediaan pasokan, yang menjadi masalah di Kota Metro karena stok pangan masih terbatas akibat penurunan produksi, sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Hal ini membuat Kota Metro bergantung pada pasokan dari daerah penghasil komoditas utama seperti beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ketiga, kelancaran distribusi, yang sangat penting karena banyak kebutuhan pangan Kota Metro dipasok dari luar daerah, terutama Pulau Jawa. Oleh karena itu, transportasi, termasuk penyeberangan Merak-Bakauheni, sangat memengaruhi distribusi yang lancar. Keempat, komunikasi efektif, di mana pemerintah berupaya memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi pasokan dan harga barang kepada masyarakat, sehingga mencegah terjadinya spekulasi atau kekhawatiran yang tidak perlu.

Data wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Kota Metro telah menerapkan strategi khusus untuk menangani krisis pangan, yang didasarkan pada kebijakan pusat melalui program “4K”. Program ini mencakup tiga aspek penting. Pertama, program 4K yang diterapkan di tingkat daerah menggunakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan kerjasama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Metro. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif di tingkat daerah. Kedua, program ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah krisis pangan melalui empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ketiga, program 4K dirancang untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan barang, serta memperlancar distribusi guna mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis pangan dan memastikan ketahanan pangan di Kota Metro tetap terjaga secara berkelanjutan.

### **Pelaksanaan Program Yang Telah Dilakukan Dalam Menanggulangi Krisis Bahan Pangan**

Pemerintah Kota Metro mengimplementasikan strategi 4K dalam enam upaya konkrit yang pertama melaksanakan operasi pasar murah, kedua melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, ketiga Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan,

keempat Gerakan menanam, kelima merealisasikan BTT, dan yang keenam dukungan transportasi dari APBN. Yang di tuangkan dalam beberapa program oleh pemerintah Kota Metro.

**Tabel 3.1 Program Pemerintah Kota Metro**

<b>Informan</b>	<b>Konteks</b>	<b>Narasi wawancara</b>
LM, (60) analis kebijakan	<p>Keterjangkauan Harga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Tani Agro Ceria yang dibarengi dengan Kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Pembagian bibit pada Gerakan Tanam Pangan Keluarga (Gertapaga)</li> <li>2. Bazar Jumat dan SPHP</li> <li>3. Penetrasi Pasar</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan (DKP3) Kota Metro mengadakan kegiatan tersebut dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. ada beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pasar tani agro ceria yaitu Gerakan penanaman GERTAPAGA, pembagian bibit cabai, dan pasar murah dengan menjual beberapa bahan pokok. Kegiatan menanam dan pembagian bibit tersebut membantu masyarakat dalam untuk menanam cabai sendiri, masyarakat tidak perlu membeli cabai di pasar, sehingga mengurangi permintaan cabai di pasar dan membantu menekan kenaikan harga.</li> <li>- Bazar jumat dan SPHP yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan, bertujuan untuk melindungi pendapatan, daya beli petani dan pelaku usaha pangan mikro maupun kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Pelaksanaan Bazar Jumat ini, Tri Novianti juga menurunkan 2,5 Ton beras pada kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Wilayah Kota Metro.</li> <li>- Bagian Perekonomian yang bekerjasama dengan Bulog melakukan penetrasi pasar. Dengan memberikan subsidi kepada Masyarakat. Kegiatan penetrasi pasar ini tentu untuk mengatasi inflasi supply dan demand. dengan adanya penetrasi pasar ini bisa membantu sedikit masyarakat untuk mendapatkan harga komoditas pangan pokok di bawah harga pasar. Bahan pokok yang di jual pun beragam mulai dari beras, cabai, bawang merah bawang putih, minyak, kecap DLL”</li> </ul>
TY, (40) analis perekonomian	<p>Ketersediaan pasokan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran Bibit pada Gerakan Tanam Pangan Keluarga (Gertapaga)</li> <li>2. Monitoring pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menerima manfaat kegiatan P2L tahun 2023</li> <li>3. Survei Stok Beras Di Pedagang Kota Metro 2024</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas DKP3 Melalui program ini pemerintah membagikan bibit tanaman, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pola konsumsi pangan dan pengendalian inflasi melalui pemanfaatan pekarangan. Total bibit yang tersalurkan Januari 5.189 bibit cabai, 645 bibit terong dan 269 bibit tomat, Februari :1.650 bibit cabai, Maret : 4.030 bibit cabai</li> <li>- kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok Wanita tani (KWT) yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan. Pemerintah berupaya untuk melakukan pemantauan lahan tersebut agar tetap terus berjalan.</li> <li>- Kegiatan survey stok beras ini pemerintah memastikan bahwa stok beras yang ada di Kota Metro cukup, Program ini dirancang untuk menjaga agar beras selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di pasaran dan dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Survei tersebut antara lain pedagang Beras di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara</li> </ul>
M (28) Analis ekonomi kreatif,	<p>Kelancaran distribusi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Mesuji</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Stock pada Distributor</li> <li>3. Sidak Harga Dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan 1445 H/2024</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja sama antar daerah (KAD) dengan Kabupaten Mesuji ini dilakukan untuk mempercepat distribusi dan suplai tanaman pangan, serta mempromosikan pemasaran produk pertanian. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Kerja sama terkait pengendalian kebutuhan pokok berupa distribusi dan suplai tanaman pangan, pemasaran produk pertanian, perdagangan pangan strategis dan fasilitasi pelaku investasi perdagangan komoditas pangan.</li> <li>- kegiatan monitoring stok dan evaluasi stok pada distributor ini dilaksanakan rutin per bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan stok bahan pokok dan mengantisipasi kenaikan harga yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Idul</li> </ul>

		<p>Fitri. Sudah terlaksana pada 10 Januari, 19 Februari dan 14 Maret 2024 8 Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ini bertujuan untuk memantau langsung ketersediaan stok dan harga bahan pokok di beberapa pasar tradisional dan modern seperti Pasar Margorejo, Pasar Basah Metro Megamall, Pasar Hambaran Agus Salim, dan Pasar Basah Terminal Kota Metro. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri.</li> </ul>
M (28) Analisis ekonomi kreatif	<p>Komunikasi efektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring harian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kota Metro Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Pemantauan Harga Pangan Kota Metro tahun 2024</li> <li>3. Rakor Inflasi bersama Kemendagri</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komunikasi efektif dalam monitoring harian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah kunci utama dalam mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan stok barang. Dinas perdagangan Kota Metro melakukan Pemantauan pada 4 Pasar yaitu di Pasar Kopindo, Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo dan Pasar Sumbersari. Dengan demikian, tim monitoring dapat memantau perkembangan harga dan stok barang secara lebih efektif dan memastikan ketersediaan stok barang untuk masyarakat.</li> <li>- komunikasi efektif antara tim pemantauan dan pihak-pihak terkait sangat penting dalam memantau perkembangan harga pangan. Dengan demikian, tim pemantauan dapat memantau perkembangan harga pangan secara lebih efektif dan memastikan ketersediaan stok pangan untuk masyarakat.</li> <li>- Kegiatan ini Rutin setiap minggu sesuai arahan Kemendagri, komunikasi efektif antara tim Rakor Inflasi dan pihak-pihak terkait sangat penting dalam memantau perkembangan harga pangan. Dengan demikian, tim Rakor Inflasi dapat memantau perkembangan harga pangan secara lebih efektif dan memastikan ketersediaan stok pangan untuk masyarakat. Dalam keseluruhan, komunikasi efektif dalam Rakor Inflasi bersama Kemendagri sangat penting untuk memantau perkembangan harga pangan di Kota Metro. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau perkembangan harga pangan dan memastikan ketersediaan stok pangan untuk masyarakat.</li> </ul>

Data wawancara pada tabel 3 di atas memperlihatkan dan menjelaskan secara kompleks berbagai program pemerintah Kota Metro yang dilakukan dalam menangani krisis bahan pangan. Pertama Keterjangkauan harga meliputi beberapa program yang pertama, dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan (DKP3) melakukan pasar tani agro ceria, Dinas perdagangan menggelar Bazar jumat dan bagian perekonomian melakukan penetrasi pasar. Kedua Ketersediaan pasokan yang dilakukan oleh dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan (DKP3) meliputi penyaluran bibit, monitoring pemanfaatan lahan pekarangan (p21) pada kelompok wanita tani, survei stok beras di. Ketiga Kelancaran distribusi ini dilakukan oleh bagian perekonomian dan dinas perdagangan kegiatan ini meliputi kerja sama antar daerah (KAD), Monitoring dan Evaluasi Stock pada Distributor, Sidak Harga Dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan. Keempat komunikasi efektif, yang dilakukan oleh DKP 30 dan bagian perekonomian yaitu dengan monitoring harian harga dan stok barang kebutuhan pokok, pemantauan harga pangan, rakor inflasi bersama kemendagri.

Hasil wawancara pada tabel di atas dapat dilihat 3 hal penting, yang pertama sudah terlaksananya program 4K yang pemerintah pusat anjurkan, dilihat dari beberapa dinas- dinas di Kota Metro telah melaksanakan berbagai program mengatasi krisis pangan ini, seperti menggelar beberapa kegiatan rutin untuk menjual berbagai bahan pangan pokok dibawah harga pasar. Yang kedua pemerintah memastikan stabilisasi pasokan dan harga pangan, menjaga keterjangkauan daya beli konsumen terhadap pangan pokok. Yang ketiga pemerintah mengajak masyarakat untuk berupaya dalam mengatasi krisis ini, dengan cara memanfaatkan pekarangan untuk ditanami sejumlah komoditas bahan pokok untuk peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat agar tidak cenderung membeli bahan pangan pokok di pasar. Dengan demikian program-program tersebut diharapkan dapat mengendalikan krisis pangan yang terjadi di Kota Metro.

Penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Metro dalam menghadapi krisis bahan pangan pada periode 2024. Berdasarkan data yang terkumpul dari wawancara dan analisis dokumen, penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting dari kebijakan yang diterapkan, yakni dengan program 4K yang mencakup keterjangkauan

harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Penerapan program ini menekankan pentingnya pendekatan terkoordinasi dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program 4K telah memberikan dampak positif dalam menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan stok bahan pangan di Kota Metro. Melalui upaya yang dilakukan seperti operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, realisasi BTT (belanja tak terduga), dan dukungan transportasi dari APBN, pemerintah mampu mengendalikan harga dan memastikan pasokan bahan pangan yang cukup. Hasilnya, masyarakat merasakan peningkatan ketersediaan pangan, harga yang lebih terjangkau, dan kepuasan yang lebih tinggi terhadap akses pangan. Hal ini tidak hanya membantu mengatasi krisis pangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menyoroti tantangan signifikan dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya terkait keterjangkauan harga bahan pangan yang masih rentan terhadap inflasi dan kenaikan biaya produksi. Fluktuasi harga komoditas pangan membuat masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, semakin sulit mengakses pangan dengan harga yang wajar. Selain itu, pemerintah menghadapi kendala dalam memastikan kelancaran distribusi, yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketergantungan ini sering menyebabkan keterlambatan distribusi dan mengganggu stabilitas pasokan lokal, terutama ketika terjadi gangguan transportasi atau lonjakan permintaan. Tantangan ini menekankan perlunya strategi jangka panjang yang mencakup peningkatan produksi pangan lokal, dan pengendalian biaya produksi untuk memastikan ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada penerapan proyek *food estate* dan diversifikasi pangan sebagai upaya mengatasi krisis pangan,<sup>19</sup> penelitian ini mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan menganalisis secara mendalam berbagai strategi dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengevaluasi efektivitas kebijakan ketahanan pangan, tetapi juga mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai upaya pemerintah Kota Metro dalam menjaga stabilitas pangan lokal serta menawarkan model kebijakan ketahanan pangan yang dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain yang menghadapi kondisi serupa.

## **SIMPULAN**

1. Terdapat lima faktor utama yang menyebabkan krisis bahan pangan di Kota Metro, yaitu penurunan produksi pangan lokal, kelangkaan stok beras, fluktuasi dan kenaikan harga komoditas pokok, Keterlambatan penyaluran bahan pangan, serta praktik penimbunan sembako pada jenis tertentu. Faktor-faktor ini mengakibatkan masyarakat kesulitan mengakses pangan yang terjangkau dan mudah didapatkan. Apabila situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di masa mendatang, mengingat hal ini berdampak langsung pada kebutuhan dasar hidup banyak orang. Krisis pangan yang berlarut-larut dapat memicu ketidakstabilan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan menambah beban pada kelompok masyarakat rentan.
2. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Metro merujuk pada regulasi nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Keputusan Walikota No. 141/KPTS/04/SETDA/2021. Regulasi ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan pokok bagi seluruh masyarakat. Regulasi tersebut memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola dan menangani krisis pangan, jika terjadi dan menjadi landasan dalam penerapan kebijakan dan program pemerintah yang terintegrasi, khususnya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan secara adil di tingkat daerah.
3. Strategi utama yang diterapkan Kota Metro adalah penerapan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), Program ini mencakup tiga aspek penting. Pertama, program 4K yang diterapkan di tingkat daerah menggunakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan kerjasama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Metro. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif di tingkat

---

<sup>19</sup> Nurul Rahmawati dan Mc Akhtar Ramzi Mahadri, "Sinergitas Kebijakan Pangan Negara Anggota ASEAN Dengan Prioritas Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Krisis Pangan Di Nusa Tenggara Timur," *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, (2024).

- daerah. Kedua, program ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah krisis pangan melalui empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ketiga, program 4K dirancang untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan barang, serta memperlancar distribusi guna mengendalikan inflasi di tingkat daerah.
4. Pemerintah melaksanakan berbagai program konkret, yaitu operasi pasar murah, bazar Jumat, dan penetrasi pasar untuk menstabilkan harga bahan pangan. Selain itu, Gerakan Tanam Pangan Keluarga (Gertapaga) yang melibatkan distribusi bibit tanaman cabai, tomat, dan terong berhasil meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Kerja sama antar daerah (KAD) juga berkontribusi dalam menjamin kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan bahan pangan di Kota Metro. Efektivitas program-program tersebut tercermin dari peningkatan ketersediaan pangan di tingkat lokal, stabilisasi harga komoditas tertentu, serta kepuasan masyarakat terhadap akses pangan yang lebih mudah. penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Metro memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Risandi, Linnia Siska dan Dahiri. "Ancaman Krisis Pangan Global Terhadap Komoditas Pangan Nasional," *Buletin APBN*, 2022
- Jumianto, Syafitri, dkk, "Efisiensi Pemanfaatan Maggot Bsf (*Hermetia Illucens*) Dalam Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan," *Edubiologia: Biological Science And Education Journal*, (2023).
- Kaslam, Kaslam. "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Pangan Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, No. 1 (2023): 85-104
- Rasman, Alsafana, dkk, "Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia," *Holistic: Journal Of Tropical Agriculture Sciences*, 2023
- Sulaiman, Aimie. "Stategi Bertahan (*Survival Strategy*), Studi Tentang 'Agama Adat' Orang Lom Di Desa Pejem," *Jurnal Society*, Vol.11, No. 1, (2014): 1-13
- Ulfah, Muthia dan Bayu Kurnia. "Strategi Bertahan Usaha Mikro Di Wilayah Pariwisata Kota Padang Di Tengah Pandemi Covid-19," *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 12, No. 2, (2021): 146-56
- Zamaya, Yelly, dkk. "Life Survival Strategy Perempuan Rumah Tangga Miskin Desa Logas Kabupaten Kuantan Singingi," *Jepp : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, (2023).
- Miyasto. "Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Kajian Lemhanas*, Vol. 12, No. 17, (2019) : 17-34
- Santoso, Bibit. "Menata Kebijakan Publik Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Masyarakat Bila Diundangkan," *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 13, No. 1, (2018): 36-53
- Handayani, Nur, dkk. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, (2021): 32-40
- Pratiwi, Dian Kus, "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum*, (2021).
- Djide, Nani Apriani Natsir, dkk, "Edukasi Diversifikasi Pangan Dan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Pencegahan Krisis Pangan Di Era Pandemi Covid-19," *Indonesian Journal Of Community Dedication*, (2022).
- Maryatin dan Subiyanto. "Sebuah Paradoks Krisis Pangan Dan Ironi Ketahanan Pangan," *Tinjauan Perspektif Islam*, (2013).

### **Prosiding**

- Rahmawati, Nurul dan Mc Akhtar Ramzi Mahadri, "Sinergitas Kebijakan Pangan Negara Anggota ASEAN Dengan Prioritas Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Krisis Pangan Di Nusa Tenggara Timur," *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, (2024).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 12 Menyatakan Pemerintah Berkewajiban Mengelola Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Pokok, Mengelola Cadangan Pangan Pokok Pemerintah, Dan Distribusi Pangan Pokok Untuk Mewujudkan Kecukupan Pangan Pokok Yang Aman Dan Bergizi Bagi Masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pasal 12 Menyatakan Dalam Melaksanakan Cpp Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6, Pemerintah Dapat Menugaskan Perum Bulog Dan/ Atau Bumn Pangan.

Keputusan Walikota Metro No.141/Kpts/04/Setda/2021 Tentang Pembentukan Monitoring Ketersediaan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok, Operasi Pasar, Dan Penerapan Pasar.

### **Website**

<https://badanpangan.go.id/blog/post/jajaki-kerjasama-dengan-isdb-nfa-paparkan-strategi-mencapai-ketahanan-pangan-dan-status-gizi>

<https://badanpangan.go.id/blog/post/pemerintah-bersama-akademisi-dan-kalangan-media-massa-siap-hadapi-tantangan-el-nino-yang-diprediksi-agustus-2023>

<https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/explore-countries/indonesia>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen-.html>